



► KEBIJAKAN PERSAMPAHAN

Produksi Sampah Jogja Berkurang 15 Ton

UMBULHARJO—Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jogja mengklaim terdapat pengurangan produksi sampah harian dengan berat 15 ton per hari sejak diberlakukannya gerakan nol sampah anorganik di wilayahnya per awal Januari lalu.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jogja Sugeng Darmanto menyebutkan petugas masih menemui sampah yang dibuang belum terpilah dengan optimal. "Sudah mulai menunjukkan tren yang positif. Kurang lebih pengurangan sebanyak 15 ton

per hari," kata Sugeng, Rabu (11/1).

Hanya saja pengurangan produksi sampah itu dihitung berdasarkan jumlah tonase atau rit truk pengangkut sampah secara keseluruhan ke TPA Piyungan. Biasanya dalam sehari produksi sampah di Kota Jogja mencapai angka 260 ton dengan 60% di antaranya merupakan sampah organik. "Kota belum catat detailnya berapa pengurangan dari jenis yang khusus anorganik, tetapi secara keseluruhan saja," ungkapnya.

Meski target Pemkot Jogja

adalah pengurangan sampah anorganik yang dibuang ke TPA Piyungan namun depo atau TPS masih menerima sampah jenis residu yang berbentuk popok, peralatan elektronik, pampers atau masker. Pihaknya mengaku masih merumuskan kebijakan yang tepat khusus bagi sampah jenis residu ini.

Selain itu evaluasi terhadap gerakan nol sampah anorganik akan dilaksanakan selama tiga bulan penuh terhitung pada akhir Maret mendatang sejak dimulai pada awal Januari ini. Evaluasi bertahap secara

bulanan memang dilakukan namun dinilai terlalu dini dalam menyimpulkan keberhasilan program itu.

"Itu tentu kami lakukan dengan evaluasi berbasis bulanan, tetapi datanya itu akan semakin baik kan selama tiga bulan langsung kalau sekarang masih terlalu bias. Misalnya sudah menurun ya tetap bisa karena masih ketambahan produk sampah dari aktivitas tahun baru kemarin," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Jogja Aman Yuridijaya.

Menurut Aman, berbagai masukan yang disampaikan

seluruh elemen nantinya juga menjadi bahan pertimbangan bagi Pemkot untuk meningkatkan kualitas program itu. Misalnya saja berkaitan dengan sarana prasarana, penjagaan depo atau TPS yang belum optimal maupun dari segi anggaran.

"Masukan dari seluruh elemen tentu jadi kunci kami untuk menyempurnakan [kebijakan], kalau pun ada masukan soal sarana dan prasarana agtau yang lain kan jadi proses penganggaran baik itu APBD perubahan 2023 maupun APBD murni 2024," katanya. (Yosef Leon)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 Juni 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005